



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 864-875

**Tantangan Penerapan Program Kartu Pra Kerja Tahun 2020:
Studi Tenaga Kerja Terdampak Covid 19**

Rahma Nanda Azizah, Keisya Damayanti, Andhila Rizkia Fanita, Muhammad
Ikhsan Ananta, Ridwan

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2578>

How to Cite this Article

APA : Nanda Azizah, R., Damayanti, K. ., Rizkia Fanita, A. ., Ikhsan Ananta, M. ., & Ridwan. (2024). Tantangan Penerapan Program Kartu Pra Kerja Tahun 2020: Studi Tenaga Kerja Terdampak Covid 19. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 864 - 875. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2578>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Tantangan Penerapan Program Kartu Pra Kerja Tahun 2020: Studi Tenaga Kerja Terdampak Covid 19

Rahma Nanda Azizah¹, Keisya Damayanti², Andhila Rizkia Fanita³, Muhammad Ikhsan
Ananta⁴, Ridwan^{5*}

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

*Email:

2310413141@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310413152@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310413159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310413097@mahasiswa.upnvj.ac.id
ridwan@upnvj.ac.id*

Diterima: 12-12-2024

| Disetujui: 13-12-2024

| Diterbitkan: 14-12-2024

ABSTRACT

The Indonesian government launched the Pre-Employment Card Program in 2020 to respond to the economic impact of the COVID-19 pandemic. The goal of this policy is to reduce the unemployment rate and revive the national economy by offering financial assistance and skill training to individuals affected by layoffs. To assess the effectiveness of the program in this context from the agenda-setting stage to evaluation it is crucial to use the policy cycle theory. Although this program is intended to reach everyone, accessibility has become a major issue. This is especially true for people living in remote areas who do not have access to digital infrastructure. Although a fully digital approach ensures administrative efficiency, this approach has proven difficult for people who are less familiar with technology. Moreover, the targeting of beneficiaries poses a problem because most beneficiaries are formal workers, not the unemployed, who should be the main focus of the program. Although this program offers valuable lessons about the difficulties in socio-economic policy-making, a thorough analysis of the Prakerja Card policy cycle shows that there is still room for improvement. A strong conceptual framework for evaluating the success of this program is provided by the integration of human resource theory and Maslow's hierarchy of needs.

Keyword : Public Policy, Unemployment, Employment.

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja pada tahun 2020 untuk menanggapi dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan memulihkan perekonomian nasional dengan menawarkan bantuan keuangan serta pelatihan keterampilan kepada individu yang terkena dampak PHK. Untuk menilai seberapa efektif program dalam konteks ini mulai dari tahap agenda setting hingga evaluasi sangat penting untuk menggunakan teori siklus kebijakan. Meskipun program ini dimaksudkan untuk menjangkau semua orang, aksesibilitas menjadi masalah besar. Ini terutama berlaku untuk orang yang tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki akses ke infrastruktur digital. Meskipun pendekatan sepenuhnya digital menjamin efisiensi administrasi, pendekatan ini ternyata sulit bagi orang-orang yang kurang akrab dengan teknologi. Selain itu, penentuan sasaran penerima manfaat menimbulkan masalah karena sebagian besar penerima manfaat adalah pekerja formal, bukan pengangguran, yang seharusnya menjadi fokus utama program. Meskipun program ini menawarkan pelajaran berharga tentang kesulitan dalam pembuatan kebijakan sosial-ekonomi, analisis menyeluruh siklus kebijakan Kartu Prakerja menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan. Kerangka konseptual yang kuat untuk mengevaluasi keberhasilan program ini diberikan oleh integrasi antara teori sumber daya manusia dan hierarki kebutuhan Maslow.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pengangguran, Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik seringkali dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan berbagai tahapan mulai dari perumusan hingga evaluasi. Salah satu kerangka yang sering digunakan untuk memahami proses ini adalah *policy cycle theory*, yang mengidentifikasi tahapan kebijakan seperti agenda setting, formulation, decision-making, implementation, dan evaluation. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis berbagai kebijakan strategis, termasuk Program Kartu Pra Kerja, yang diluncurkan pada 2020 untuk merespons dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Program Kartu Prakerja dirancang sebagai bentuk kebijakan sosial yang menggabungkan pendekatan *welfare-to-work*, bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja sekaligus memberikan bantuan tunai. Program ini memiliki dua tujuan utama: meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan dan mengurangi dampak langsung ekonomi pada masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan ini mencerminkan intervensi negara dalam ekonomi, sesuai dengan pandangan yang menekankan pentingnya peran negara dalam menangani pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana disarankan oleh tradisi pemikiran Keynesian dan teori perlindungan sosial modern (Muhyiddin et al., 2022; Amelia & Arief, 2021).

Pelaksanaan Program Kartu Prakerja mencerminkan peran penting negara dalam intervensi ekonomi, sesuai dengan pandangan Keynesian yang menekankan pentingnya kebijakan publik dalam mengatasi masalah pengangguran. Pandangan ini didukung oleh teori perlindungan sosial modern, yang menekankan bahwa negara harus menjadi aktor utama dalam menyediakan jaring pengaman sosial dan membangun kapasitas masyarakatnya. Dengan cara ini, Program Kartu Prakerja tidak hanya menjadi kebijakan responsif terhadap krisis, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kombinasi pelatihan daring dan bantuan tunai, program ini diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih mandiri dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang cepat.

Namun, keberhasilan program ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang dihadapi pada setiap tahap siklus kebijakan. Pada tahap agenda setting, pandemi menjadi pemicu utama yang mempercepat proses perumusan kebijakan. Namun, di sisi lain, tantangan teknis dan sosial muncul pada tahap implementasi. Penggunaan teknologi digital untuk pelatihan menghadirkan kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet. Selain itu, sistem pendaftaran berbasis kuota menimbulkan pertanyaan mengenai inklusivitas kebijakan, karena banyak pekerja informal yang tidak dapat mengakses program ini tepat waktu. Kritik juga muncul terkait transparansi dalam pengelolaan anggaran dan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan keterampilan nyata para peserta.

Evaluasi terhadap program ini menunjukkan bahwa meskipun manfaatnya dirasakan oleh sebagian besar peserta, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Salah satu aspek penting adalah memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang terlayani secara digital. Selain itu, perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa mitra pelatihan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Dengan memanfaatkan teori *policy cycle*, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi kekuatan dan kelemahan program ini secara lebih sistematis, sehingga menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Namun, implementasi Kartu Prakerja menghadapi berbagai tantangan yang memperlihatkan kompleksitas siklus kebijakan di Indonesia. Pada tahap agenda setting, kebijakan ini diprioritaskan sebagai respons cepat terhadap lonjakan pengangguran akibat pandemi. Di tahap implementasi, pemerintah menghadapi tantangan teknis dan sosial, termasuk keterbatasan akses digital bagi kelompok rentan, ketimpangan distribusi, serta kritik terhadap efisiensi dan transparansi program (Ramadhan, 2020). Misalnya, beberapa peserta mengalami kesulitan mengakses platform digital karena masalah infrastruktur teknologi dan sinyal yang tidak merata di wilayah tertentu (Handayani & Rachman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik di atas kertas dapat menghadapi kendala signifikan saat diimplementasikan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Evaluasi awal menunjukkan bahwa program ini telah membawa manfaat bagi sebagian penerima, seperti meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar kerja. Namun, masih ada tantangan dalam memastikan program ini dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, sistem kuota per gelombang dan mekanisme pendaftaran yang berbasis daring memunculkan pertanyaan tentang inklusivitas kebijakan ini bagi masyarakat kurang mampu dan mereka yang tinggal di daerah terpencil (Kurnianingsih, 2020). Secara teori, policy cycle memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan Program Kartu Pra Kerja di setiap tahap siklus kebijakannya. Dengan demikian, studi tentang program ini tidak hanya membantu mengevaluasi keberhasilan kebijakan tetapi juga memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan serupa di masa depan. Analisis mendalam terhadap siklus kebijakan Kartu Pra Kerja dapat menjadi contoh aplikasi nyata dari teori kebijakan publik dalam konteks Indonesia, sekaligus menunjukkan bagaimana teori ini dapat digunakan untuk memandu perbaikan kebijakan di masa depan (Bachtar et al., 2020; Muhyiddin et al., 2022).

Meskipun demikian, evaluasi awal menunjukkan bahwa program ini telah membawa manfaat positif bagi sebagian besar peserta. Program ini membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sebelumnya tidak memiliki akses ke pelatihan profesional, sehingga memberikan mereka daya saing lebih besar di pasar kerja. Selain itu, bantuan keuangan yang diberikan juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Namun, manfaat ini belum dirasakan secara merata, terutama oleh masyarakat di daerah terpencil atau kelompok yang kurang terlayani secara digital. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam yang tidak hanya mengukur efektivitas program, tetapi juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di setiap tahap siklus kebijakan.

Secara teori, policy cycle memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami kekuatan dan kelemahan Program Kartu Prakerja di setiap tahap siklus kebijakannya. Dari tahap agenda setting hingga evaluasi, program ini memberikan pelajaran berharga tentang tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam merancang dan menjalankan kebijakan sosial-ekonomi yang kompleks di tengah situasi darurat. Studi mendalam terhadap siklus kebijakan ini tidak hanya membantu mengevaluasi keberhasilan program, tetapi juga memberikan wawasan untuk pengembangan kebijakan serupa di masa depan. Dengan menggunakan pendekatan ini, pembuat kebijakan dapat lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan serupa di masa mendatang, serta memastikan bahwa manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Bagaimana pemerintah mengimplementasikan Program Kartu Pra Kerja bagi tenaga kerja di era Covid 19, serta tantangan apa yang dihadapi dalam setiap tahapan pada siklus kebijakan dari agenda setting, formulation, decision-making, implementation, hingga evaluation yang dapat mempengaruhi efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja di era digital?

KAJIAN LITERATUR

Penelitian program Kartu Prakerja bertujuan untuk menganalisis efektivitasnya dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap pengangguran di Indonesia. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan memberikan bantuan stimulus kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi. Berdasarkan Perpres 76 Tahun 2020, Kartu Prakerja telah diintegrasikan ke dalam skema bantuan sosial nasional sebagai upaya perlindungan masyarakat menghadapi krisis pandemi. Hal ini mencerminkan pentingnya kebijakan adaptif untuk merespons situasi darurat, seperti pandemi, untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat (Rozikin & Oktrasari, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini banyak digemari masyarakat, banyak peserta yang antusias mengikuti pelatihan digital. Program ini memungkinkan beberapa peserta memperoleh keterampilan baru yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, permasalahan aksesibilitas menimbulkan hambatan besar, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan dengan infrastruktur digital yang terbatas. Selain itu, pelaksanaan program juga diwarnai dengan tantangan seperti tidak tepat sasaran penerima manfaat, yang sebagian besar adalah pekerja formal dan bukan pengangguran yang menjadi sasaran utama (Memah et al., 2022), (Abidin, 2021).

Program Kartu Prakerja menggunakan pendekatan full digital dalam pelaksanaannya sehingga menjamin efisiensi proses administrasi dan pelatihan. Namun, pendekatan ini memiliki kelemahan ketika menjangkau masyarakat yang kurang melek digital atau tidak memiliki akses terhadap perangkat dan jaringan Internet. Tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang signifikan antara perkotaan dan pedesaan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan program ini dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat di daerah terpencil (Memah et al., 2022).

Sebagian dari Dalam Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program Kartu Prakerja dirancang untuk memberikan dampak ganda, yakni mengurangi pengangguran melalui peningkatan daya beli masyarakat. Insentif yang diberikan setelah pelatihan diharapkan dapat membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar mereka di saat krisis. Namun studi BPS yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar penerima manfaat tidak memanfaatkan pelatihan secara optimal untuk meningkatkan keterampilan profesionalnya, sehingga menunjukkan perlunya pelatihan untuk meningkatkan keterampilan profesional mereka. perbaikan dalam evaluasi pelatihan dan distribusi manfaat (Memah et al., 2022), (Abidin, 2021).

Meski menghadapi berbagai tantangan, program Kartu Prakerja tetap menunjukkan potensi menjadi solusi strategis dalam memerangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan menggunakan data dan analisis yang lebih mendalam, program ini dapat terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era digital. Selain itu, kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, swasta dan Masyarakat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program ini di masa depan (Rozikin & Oktasari, 2023).

Landasan Teori

Program Kartu Prakerja dapat dianalisis dengan menggunakan teori-teori berikut:

1. Teori Human Capital

Teori human capital yang dikembangkan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker. Schultz menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan produktivitas individu dan sosial. Sebagai bagian dari Piagam Pra-Kerja, pelatihan kualifikasi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Dengan berinvestasi pada pelatihan ini, diharapkan angkatan kerja menjadi lebih kompetitif dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih besar.

Becker melengkapi pandangan ini dengan menekankan pentingnya pelatihan berdasarkan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ia berpendapat bahwa keterampilan yang relevan dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi individu dan dunia usaha. Pada program Kartu Prakerja, pelatihan cocok untuk: perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja, seperti pelatihan digital yang saat ini menjadi kebutuhan utama di era revolusi industri ke-4.0. Pendekatan ini memastikan peserta tidak hanya mempelajari keterampilannya, namun juga mampu menerapkannya dalam dunia kerja atau berwirausaha

2. Teori hierarki kebutuhan Maslow

Teori ini juga penting untuk menganalisis manfaat program ini. Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan fisiologis dan rasa aman harus dipenuhi sebelum individu dapat mencapai potensinya. maksimum. Pada program Kartu Prakerja, insentif finansial yang diberikan setelah pelatihan membantu memenuhi kebutuhan dasar peserta, seperti pembelian sembako. Dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, peserta harus dapat fokus pada pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan

Integrasi antara teori sumber daya manusia dan hierarki kebutuhan Maslow memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengevaluasi keberhasilan program piagam pra-kerja. Kedua teori tersebut Hal ini menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan dasar dan mengembangkan keterampilan, yang merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, program Kartu Prakerja dapat lebih efektif dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di masa pandemi, serta menjadi landasan bagi pengembangan sumber daya manusia di masa depan

Maka dari itu, Penerapan program Kartu Prakerja mencerminkan pentingnya pendekatan berbasis teori dalam perancangan kebijakan publik agar efektif. Dengan fokus pada kebutuhan dasar dan pelatihan yang relevan, program ini tidak hanya membantu peserta bertahan di masa pandemi, namun juga mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masa depan. Integrasi teori ini dapat menjadi model kebijakan serupa di sektor lain yang memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur untuk menganalisis efektivitas Program Kartu Prakerja yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman dan perspektif peserta program, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode kualitatif meliputi analisis dokumen, hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam setiap tahap siklus kebijakan, mulai dari agenda setting hingga evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Program Pra Kerja merupakan usaha yang dilakukan pemerintah pada saat Covid-19 tahun 2020 dimana masalah utamanya adalah banyaknya pengangguran karena para pekerja banyak terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), adapun kebijakan program kartu prakerja ini untuk memberikan pelatihan keterampilan sekaligus memberikan bantuan berupa meningkatkan kemampuan dan uang tunai, yang diharapkan kartu ini dapat mengurangi dan memulihkan kembali kinerja perekonomian (Rizal & mukaromah, 2022) Indonesia dari dampak tingginya pengangguran di Indonesia periode Covid-19.

Salah satu tantangan yang menjadi krusial dalam penerapan teori siklus kebijakan di Indonesia adalah penggunaan agenda setting, melalui ini pemerintah memfokuskan pada pelatihan online dan offline agar peserta dapat memilih waktu yang fleksibel. Pada Formulasinya pendekatan empiris memainkan peran dalam memastikan kebijakan yang dirancang berdasarkan data yang terkait pada pasar kerja dan kebutuhan para tenaga kerja. Selain itu, pada Decision-Making proses pengambilan keputusan dalam program memiliki tantangan pada birokrasi dan keterbatasan pada sumber daya, cara mengatasinya adalah memberikan pelatihan berbasis lokal, sedangkan implementasi yang sering kali menjadi hambatan terutama pada kesenjangan infrastruktur dan kurangnya pelatihan yang memadai terutama di daerah terpencil. Maka dari itu, evaluasi dari efektivitas Program Kartu Pra Kerja memerlukan pendekatan yang mengukur adanya dampak nyata terhadap persaingan daya saing tenaga kerja.

Program Kartu Prakerja merupakan salah satu upaya pemerintah yang diluncurkan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 untuk mengatasi masalah lonjakan pengangguran akibat banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Kebijakan ini bertujuan memberikan pelatihan keterampilan sekaligus bantuan finansial berupa insentif untuk meningkatkan kemampuan dan mendukung daya saing tenaga kerja. Program ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta memulihkan kembali kinerja perekonomian Indonesia (Rizal & Mukaromah, 2022).

Pelaksanaan program ini mencerminkan berbagai potensi dan tantangan. Dari segi efektivitas pelatihan, program ini menyediakan pelatihan daring dan luring yang memungkinkan peserta memilih waktu yang fleksibel. Namun, kesenjangan digital dan kurangnya infrastruktur di daerah terpencil menjadi hambatan utama dalam implementasi program, sehingga menurunkan inklusivitas. Evaluasi awal menunjukkan bahwa meskipun program ini membawa manfaat signifikan, seperti peningkatan keterampilan di bidang digitalisasi dan kewirausahaan, masih terdapat tantangan dalam relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Pembahasan

Implementasi Program Kartu Pra Kerja Periode Covid-19 Tahun 2020 di Indonesia

Dampak pandemi Covid 19 memicu lonjakan pengangguran akibat adanya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dan penutupan banyak usaha kecil dan menengah. Hal ini menciptakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dan bersaing di pasar kerja. Dengan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan memberikan bantuan finansial berupa insentif kepada penerima program kartu prakerja mendukung untuk transformasi ekonomi digital melalui pelatihan berbasis teknologi.

Sebagai bentuk program jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah, program kartu prakerja dimungkinkan dapat mengatasi masalah mengenai pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sejak pertama kali Joko Widodo mencetuskan program kartu prakerja ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai pemberian uang bagi pencari kerja itu perlu dipikirkan lebih lanjut, terutama terkait pada pertimbangan sumber dana, termasuk biaya pembuatan kartu dan sosialisasinya (Rawie & Samputra, 2020). Pertanyaan dari Misbakhun ini memfokuskan pada besarnya rincian biaya dan sumber dana untuk program kartu prakerja harus memiliki rincian dan kematangan rumusan terlebih dahulu. Dengan perhitungan besarnya rincian anggaran yang dikeluarkan pemerintah dapat menentukan dan mencari darimana sumber jaminan sosial akan dianggarkan.

Pandemi COVID-19 memicu lonjakan pengangguran akibat PHK dan penutupan banyak usaha kecil dan menengah. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pengembangan keterampilan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan pasar kerja. Program Kartu Prakerja hadir sebagai bentuk program jaminan sosial pemerintah untuk memberikan pelatihan berbasis teknologi dan bantuan finansial berupa insentif kepada penerima. Hal ini sejalan dengan upaya transformasi ekonomi digital.

Namun, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan teori siklus kebijakan adalah pada tahapan agenda setting, formulation, decision-making, implementation, dan evaluation. Agenda Setting difokuskan pada pelatihan daring dan luring untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta. Dalam Formulation, pendekatan berbasis data digunakan untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan pasar kerja. Pada tahap Decision-Making, tantangan birokrasi dan keterbatasan sumber daya memengaruhi proses pengambilan keputusan, sehingga pelatihan berbasis lokal menjadi salah satu solusinya. Sementara itu, pada Implementation, kesenjangan infrastruktur dan pelatihan yang kurang memadai di daerah terpencil menjadi hambatan. Untuk itu, Evaluation diperlukan untuk mengukur dampak nyata program ini terhadap daya saing tenaga kerja.

Sebagai program jaminan sosial, Kartu Prakerja memiliki potensi besar untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun, terdapat kritik terkait rincian anggaran dan sumber dana yang harus direncanakan dengan matang (Rawie & Samputra, 2020). Pengawasan terhadap efisiensi dan transparansi anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program.

Benefit yang diperoleh dari Pengguna Program Kartu Pra Kerja

Pelaksanaan program ini memberikan berbagai manfaat bagi penerima, seperti peningkatan keterampilan kerja, insentif finansial untuk meringankan beban ekonomi, dan peluang untuk beradaptasi dengan pasar kerja berbasis teknologi. Namun, efektivitas insentif ini dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang perlu dievaluasi lebih lanjut. Kesenjangan dalam kualitas pelatihan dan aksesibilitas menjadi aspek krusial yang membutuhkan perbaikan berkelanjutan.

Evaluasi Kebijakan Program Kartu Pra Kerja di Indonesia

Evaluasi kebijakan menunjukkan pentingnya meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja melalui evaluasi berkala terhadap kurikulum. Selain itu, perlu ada penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan transparansi, efektivitas, dan inklusivitas. Memperluas jangkauan program dengan memperkuat infrastruktur digital di daerah terpencil juga menjadi rekomendasi penting agar program ini dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hasil Penelitian

Penelitian mengenai Program Kartu Prakerja menunjukkan berbagai hasil yang mencerminkan potensi sekaligus tantangan program ini dalam merespons dampak pandemi COVID-19 terhadap pengangguran dan daya saing tenaga kerja di Indonesia.

1. Efektivitas Pelatihan

Pelatihan daring yang disediakan oleh program ini memungkinkan peserta memperoleh keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sebagian besar peserta merasakan manfaat dari pelatihan tersebut, terutama dalam bidang-bidang yang terkait dengan digitalisasi dan kewirausahaan.

2. Tantangan Aksesibilitas

Meskipun berbasis digital, program ini menghadapi hambatan dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil atau kelompok rentan yang kurang memiliki akses terhadap infrastruktur teknologi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan digital yang signifikan, sehingga menurunkan inklusivitas program.

3. Manfaat Ekonomi

Insentif keuangan yang diberikan setelah pelatihan terbukti membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak pandemi. Namun, efektivitas insentif ini dalam menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang masih perlu dievaluasi lebih mendalam.

4. Efisiensi Administrasi

Pendekatan full digital meningkatkan efisiensi administrasi, namun tidak sepenuhnya menjamin efektivitas implementasi, terutama dalam memastikan penerima manfaat yang tepat sasaran. Sebagian besar penerima manfaat ternyata berasal dari pekerja formal, bukan pekerja informal atau pengangguran yang menjadi target utama program.

5. Kesenjangan dalam Pelatihan

Studi menunjukkan bahwa banyak peserta tidak dapat memanfaatkan pelatihan secara optimal karena kurang relevannya materi dengan kebutuhan kerja mereka. Evaluasi terhadap kualitas dan relevansi pelatihan menjadi area penting untuk ditingkatkan.

Pembahasan

Program Kartu Prakerja dapat dianalisis melalui kerangka policy cycle, yang mencakup tahapan agenda setting, formulation, decision-making, implementation, dan evaluation.

1. Agenda Setting

Pandemi COVID-19 berperan sebagai pemicu utama kebijakan ini, menunjukkan respons cepat pemerintah dalam menangani lonjakan pengangguran. Kebijakan ini juga mencerminkan tradisi Keynesian yang menekankan pentingnya intervensi negara dalam krisis ekonomi.

2. Formulation dan Decision-Making

Program ini dirancang dengan pendekatan berbasis teori human capital dan hierarki kebutuhan Maslow, yang mengutamakan pelatihan keterampilan dan insentif finansial sebagai solusi dual-purpose.

3. Implementation

Tantangan terbesar terletak pada implementasi. Kesenjangan digital, kurangnya infrastruktur di daerah terpencil, dan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat menghambat efektivitas program. Kritik terhadap transparansi dan efisiensi pelaksanaan juga mengemuka.

4. Evaluation

Evaluasi awal menunjukkan bahwa meskipun program ini membawa manfaat bagi sebagian besar peserta, aksesibilitas dan relevansi pelatihan menjadi dua aspek kritis yang perlu diperbaiki. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap mitra pelatihan agar materi yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Dengan mengintegrasikan teori human capital dan hierarki kebutuhan Maslow, program ini dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Kerjasama lintas sektoral antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Rekomendasi

1. Memperluas jangkauan program dengan memperkuat infrastruktur digital di daerah terpencil.
2. Mengembangkan mekanisme seleksi penerima manfaat yang lebih inklusif untuk menjangkau pekerja informal dan pengangguran.
3. Meningkatkan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja melalui evaluasi berkala terhadap kurikulum.
4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan transparansi dan efektivitas anggaran.

Program Kartu Prakerja memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan publik dapat menjadi instrumen strategis dalam menghadapi krisis ekonomi. Dengan evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan berbasis teori, program ini dapat menjadi model kebijakan sosial yang adaptif dan berkelanjutan di masa depan.

KESIMPULAN

Program Kartu Prakerja adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang dibuat sebagai tanggapan atas dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi. Dengan memberikan pelatihan keterampilan dan insentif finansial kepada para peserta, program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran. Meskipun sebagian besar peserta program mengalami manfaat, evaluasi awal menunjukkan bahwa ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan efisiensi dan inklusi program. Salah satu masalah terbesar dalam menerapkan Kartu Prakerja adalah ketiadaan infrastruktur digital, yang membuat orang tidak dapat mengaksesnya, terutama di wilayah terpencil. Banyak peserta tidak memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur digital, yang membuatnya sulit untuk mengikuti pelatihan dengan baik.

Selain itu, penentuan sasaran penerima manfaat juga menjadi masalah, karena sebagian besar penerima manfaat adalah pekerja formal, bukan pengangguran, yang seharusnya menjadi fokus utama program ini. Ini menunjukkan bahwa mekanisme penargetan harus diperbaiki agar program dapat mencapai orang-orang yang paling membutuhkan. Banyak peserta melaporkan bahwa materi pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga program tidak efektif dalam meningkatkan keterampilan dan daya saing. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap mitra pelatihan dan evaluasi berkala terhadap kurikulum.

Secara keseluruhan, meskipun Program Kartu Prakerja dapat membantu pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, ada beberapa masalah dengan pelaksanaannya dan evaluasinya. Keberlanjutan dan efektivitas program bergantung pada kerja sama lintas sektoral antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Program ini dapat lebih baik memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia dengan meningkatkan infrastruktur digital, meningkatkan relevansi pelatihan, dan memperbaiki mekanisme penargetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z., (2021). Pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi covid-19: analisis produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117-138.
- Amelia Dwi Handayani & Arief Rachman (2021). Analysis of the Effectiveness of Pre-Employment Cards in the Midst of the Covid-19 Pandemic.
- Amelia Dwi Handayani & Arief Rachman (2021). Analysis of the Effectiveness of Pre-Employment Cards in the Midst of the Covid-19 Pandemic.
- Kurnianingsih, H., et al. (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Kurnianingsih, H., et al. (2020). Konsep Kebijakan Strategis dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari COVID-19. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Memah, N. I., Rares, J. J., & Waleleng, G. J. (2022). Efektivitas program kartu prakerja era pandemi COVID-19 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 18(1), 247-254.
- Mendari, A. S. (2010). Aplikasi teori hierarki kebutuhan Maslow dalam meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. *Widya Warta: Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 34(1), 82-91.
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). Konsepsi dan Implementasi Program Kartu Prakerja dalam Kebijakan Strategis Penanganan Eksternalitas Ekonomi Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 5(1), 1-17.
- Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., et al. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-Work di Masa Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*.
- Muhyiddin, M., Putra, F., Suryono, I. L., et al. (2022). Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-Work di Masa Pandemi Covid-19. *Bappenas Working Papers*.
- Nurhadi, W. (2020, 21 Mei). Implementasi kebijakan program kartu prakerja di tengah pandemi COVID-19.
- Pratiwi, K. D., & Kurniasari, D. (2023). Penerapan Model Panel: Determinan Tingkat Pertumbuhan Inklusif Indonesia.
- Puspasari, S. (2019). Pengaruh partisipasi angkatan kerja terdidik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Perspektif modal manusia. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*, 16(2), 194-209.
- Ramadhan, A. (2020). Program Kartu Prakerja Dianggap Bermasalah, Ini 7 Rekomendasi dari KPK. *Kompas*.

- Ramadhan, A. (2020). Program Kartu Prakerja Dianggap Bermasalah, Ini 7 Rekomendasi dari KPK. Kompas.
- Rozikin, M., & Oktasari, F. W. (2023). Efektivitas program kartu prakerja dalam menurunkan pengangguran di masa pandemi COVID-19. *KOLABORATIF: Jurnal Isu Sosial dan Tinjauan Kebijakan*, 1(1).